

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2008

Kontrak LNG Tangguh Direvisi

JAKARTA(MI): Setelah merevisi kontrak gas alam cair (*liquified natural gas/LNG*) dari Kilang Tangguh dengan para operator, yakni BP dan CNOOC, pemerintah diperkirakan akan mendapat tambahan penerimaan negara sekitar Rp36,86 triliun (sekitar US\$4,05 miliar).

Deputi Finansial dan Ekonomi Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Eddy Purwanto akhir pekan lalu di Jakarta, mengatakan penambahan penerimaan negara tersebut sekitar Rp12,7 triliun (US\$1,4 miliar) didapatkan dari perubahan batas atas harga minyak mentah Japan Crude Cocktail (JCC) yang semula US\$25 per barel menjadi US\$38 per barel. "Dengan perubahan batas tersebut, penerimaan untuk proyek Tangguh akan meningkat US\$2,3 miliar atau US\$1,4 miliar untuk penerimaan negara," ujar Eddy.

Dalam kontrak sebelumnya yang diteken pada 2004 dengan pembeli China, Fujian, proyek LNG Tangguh dihargai dengan batas bawah JCC sebesar US\$15 per barel dan batas atas US\$25.

Sementara itu, Kepala BP Migas Kardaya Warnika menyatakan di samping perubahan batas minyak tersebut, pemerintah bisa mengalihkan gas ke pembeli lain. "Kontrak LNG Tangguh ke pembeli asal Meksiko, West Coast Sempra Energy, memberikan fleksibilitas untuk melakukan pengalihan ke pembeli lain sampai dengan 1,85 juta metrik ton atau 50% dari volume kontrak per tahun untuk pasar Asia yang memberikan harga yang lebih tinggi," jelasnya.

Karena itu, kata Kardaya, LNG yang dialihkan berpeluang mendapatkan harga yang lebih baik sesuai dengan pasar. **(Eva/E-2)**

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2008

Produksi Minyak 910 Ribuan Bph

JIKA asumsi produksi minyak jadi ditetapkan pemerintah sebesar 910 ribu barel per hari (bph) dalam APBN Perubahan 2008, penerimaan negara diperkirakan hanya akan terdongkrak sedikit dari *windfall profit* yakni sekitar Rp5 triliun. Lain halnya jika asumsi produksi minyak yang dipakai tetap seperti perhitungan APBN 2008 yakni 1,034 juta bph. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengatakan dengan asumsi produksi 1,034 juta bph dan harga minyak Indonesia (*Indonesia crude price*) US\$80 per barel, penerimaan negara akan naik sedikitnya Rp33 triliun. "Saya sendiri tidak mengerti mengapa Depkeu memakai asumsi produksi seperti itu. Karena dengan produksi sebesar itu, kita tidak akan mendapatkan *windfall profit* lebih besar," ujarnya di Jakarta, kemarin. Menkeu Sri Mulyani mengatakan tingkat *lifting* minyak Indonesia tahun 2007 hanya sekitar 899 ribu barel per hari atau meleset dari target 910 ribu barel per hari. Sementara itu, kalau berdasarkan perhitungan BP Migas, *lifting* 2007 mencapai 912.811 barel per hari. (Eva/E-2)



Sri Mulyani
Menteri Keuangan

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11	12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23	24 25 26 27	28 29 30 31					

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Beban Rakyat pada BBM Nonsubsidi

SETELAH harga minyak dunia sempat menembus kisaran US\$100 per barel, pemerintah mengubah asumsi dalam APBN 2008. Implikasi kebijakan itu, salah satunya pemerintah hendak menerapkan pembatasan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar bersubsidi. Dengan pembatasan itu, pemerintah berharap akan menghemat subsidi sekitar Rp20 triliun.



Mekanismenya akan berjalan melalui penggunaan kartu pintar dengan deretan kode angka. Kartu itu ditempelkan di kaca depan kendaraan agar mereka yang tidak berhak membeli BBM bersubsidi dapat langsung terbaca pemindai. Kendaraan umum dan jenis lain yang berhak akan membeli BBM dengan harga tetap. Di luar itu, diharuskan membeli BBM tanpa subsidi dengan harga lebih tinggi.

Terlepas dari tuduhan bahwa skenario itu mengandung agenda liberalisasi total di sektor hilir industri migas, saat para investor asing kelak lebih leluasa melakukan ekspansi usaha ke Indonesia dengan harga pasar yang lebih menguntungkan, pembatasan itu semakin menunjukkan betapa lemah ketahanan fiskal dan energi negeri ini menghadapi fenomena global.

Penyebab itu semua, sejatinya jauh lebih banyak faktor internal daripada eksternal. Terutama, akibat kekeliruan dalam menetapkan strategi ekonomi secara menyeluruh. Sebelum kebijakan itu dijalankan, alangkah bijak jika pemerintah mengkaji seberapa jauh pembatasan itu akan memicu kenaikan harga-harga dan inflasi serta menurunkan kapasitas produksi nasional. Itu penting, mengingat bila benar itu kelak mendorong kenaikan harga dan inflasi yang tidak terkendali, sama artinya dengan menambah beban rakyat. Bila benar kelak akan menurunkan kapasitas produksi nasional, sama artinya memicu kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan.

Harus dicatat bahwa kendali pemerintah selama ini terbukti lemah ketika sebuah kebijakan tidak efektif keburu diambil. Kasus bantuan langsung tunai (BLT) saat kenaikan harga BBM Maret dan Oktober 2005, subsidi minyak goreng, dan gagalnya peran Bulog setelah direformasi, menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam mengendalikan harga dan dampaknya pada meningkatnya kemiskinan.

Pembatasan premium bersubsidi ini, dalam bahasa lain, sebenarnya setali tiga uang dengan kenaikan harga BBM. Naik bila dihitung berdasarkan perubahan asumsi harga minyak APBN 2008 yang melonjak sekitar 30% dari US\$60 menjadi US\$80. Hanya saja pemerintah tidak menghendaki hal kenaikan harga BBM itu ditekan. Apalagi ia akan melanggar kaidah-kaidah populisme menjelang Pemilu 2009.

Mengapa pemerintah lebih suka memilih eufemisme itu? Mengapa tidak mengambil jalan lain untuk menutup defisit anggaran, misalnya dengan menekan pemborosan dalam *cost recovery* bidang migas yang mencapai US\$8,3 miliar atau hampir Rp80 triliun per tahun dan sejauh ini dibiarkan? Atau memperbaiki teknologi kilang kita agar efisien sehingga menekan impor BBM, serta membangun kerja sama dengan negara-negara yang jauh lebih menguntungkan dalam pemenuhan dan investasi bidang energi? Yang selalu diambil adalah opsi cepat, murah, dan mudah bagi pemerintah, tetapi lambat, mahal, dan berat bagi rakyat. Sudah saatnya kebiasaan buruk itu diakhiri.

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

BOR 525 SUMUR

Target Produksi Minyak Chevron Turun 11.500 Bph

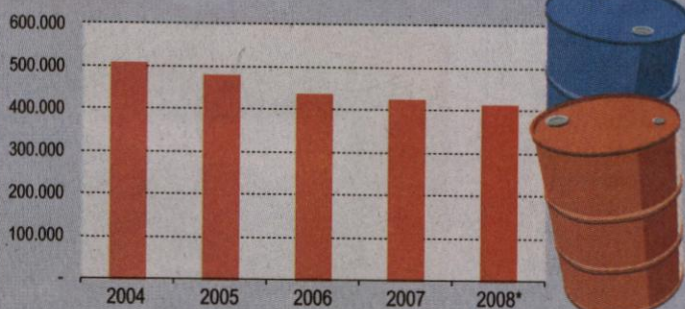
JAKARTA - Produksi minyak mentah PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tahun ini kemungkinan bakal melorot dibanding tahun lalu. Tahun ini Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) menargetkan CPI memproduksi 414.000 barel setara minyak per hari (bph) kendati pada tahun lalu berhasil mengebor minyak rata-rata 425.500 bph.

Menurut Direktur Utama CPI Suwito Anggoro, target produksi realistis manajemen CPI tahun ini sebetulnya 403 ribu bph. Produksi minyak mentah sebesar ini rencananya berasal dari 525 sumur yang akan dibor. "Kami tetap akan bekerja keras memenuhi target pemerintah (BP Migas) dengan memberdayakan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada," ujar Suwito Anggoro dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (10/2).

Dasar penentuan target realistis 403 ribu bph, menurut Suwito, berpijak pada probabilitas sukses seimbang (P5) atau *expected value* (EV). Pola inilah yang juga dipertimbangkan CPI untuk menentukan target produksi minyak tahun ini. "Kami akan mengusahakan sekuat tenaga agar probabilitas sukses semakin kecil, tidak P50 lagi," jelas dia.

Produksi Minyak PT CPI (bph)

Tahun 2008, target produksi versi PT CPI sebesar 403 ribu bph sedangkan pemerintah menargetkan produksi PT CPI sebesar 414 ribu bph



Sumber: PT CPI

Tahun lalu CPI mampu melampaui target yang diberikan pemerintah sebesar 425.500 bph dari target yang tertuang dalam *work program and budget* (WP&B) sebanyak 415.000 bph. Hasil produksi tersebut diperoleh melalui peningkatan aktivitas pengeboran hingga 365 sumur, sehingga terjadi penambahan produksi sumur rata-rata 14.000 bph. Pengeboran 365 sumur itu di atas target awal yang hanya 284 sumur.

Suwito menegaskan, target produksi minyak mentah yang diharapkan pemerintah kepada CPI harus didukung semua instansi terkait, seperti BP Migas maupun pemerintah daerah. CPI, menurut dia, akan bekerja sama secara

intensif dengan berbagai pihak, termasuk BP Migas, agar target yang diharapkan pemerintah kepada perusahaan asal Amerika Serikat itu bisa berjalan tepat waktu dan gangguan produksi dapat diminimalisasi. "Kerja sama yang baik terbukti mampu mendorong produktivitas CPI seperti pencapaian tahun lalu," ujar dia.

Dalam industri migas, menurut Suwito, pencapaian target produksi juga dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya kemudahan prosedur, kondisi cuaca dan lingkungan, dan keamanan. Selain itu, ketersediaan barang kebutuhan operasi yang krusial maupun masalah lahan ikut menjadi penyebab. (pya)

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T. 4

TAHUN 2008

Pembatasan BBM rawan penyimpangan

Oleh RUDI ARIFFIANTO & RONI YUNianto
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Rencana pemerintah untuk membatasi pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar dengan menggunakan kartu pintar (smartcard) rawan penyimpangan dan kekacauan di masyarakat.

Namun, pemerintah tampaknya tetap berpegang menjalankan rencana itu pada Mei ini. Bahkan, konsultan untuk menangani perangkat dan implementasi kartu pintar itu kini dicari dan segera dilakukan *beauty contest*.

Direktur Center of Petroleum and Energy for Economics Studies Kurtubi mengatakan rencana pembatasan penggunaan premium dan solar rawan terjadi penyimpangan. Pemerintah, lanjutnya, sebaiknya mengoptimalkan penggunaan energi alternatif yang lebih murah dan bersih, seperti bahan bakar gas (BBG).

"Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan penggunaan energi alternatif misalnya BBG. Selain lebih murah, bahan bakar itu tersedia cukup banyak dari sisi cadangan dan bersih terhadap lingkungan," tuturnya akhir pekan lalu.

PT Pertamina (Persero) sendiri juga mengingatkan dan meminta program itu dikaji lebih matang. Menurut Dirut Pertamina Ari Hernanto Soemarno, program itu sebaiknya dikaji lebih matang sehingga tidak menimbulkan masalah pada tataran publik konsumen. "Nanti kalau terjadi antrean, Pertamina lagi yang disalahkan," tegasnya.

Sekjen Komite Indonesia untuk Penghematan dan Pengawasan Energi (Kipper) Sofyano Zakaria juga meminta pemerintah melakukan persiapan lebih matang sebelum rencana itu diimplementasikan. Bila tidak, katanya, program itu bisa menyebabkan kekacauan dan memunculkan biaya sosial politik yang besar. "Jangan hanya melihat penghematan subsidi

Jumlah SPBU yang akan menerapkan program kartu pintar

UPMS III (DKI Jakarta, Jabar, Banten)

1190

Jabodetabek

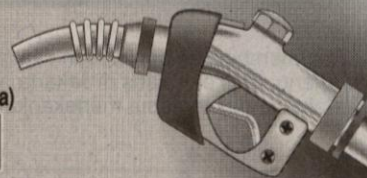
605

UPMS IV (Jateng & Yogyakarta)

634

UPMS V (Jatim-Madura & Bali)

836



Sumber: BPH Migas, diolah

BISNIS/ADI PURDIYANTO

BBM saja," katanya dalam siaran pers.

Adanya kekhawatiran itu dibantah oleh Anggota Komite BPH Migas Adi Subagyo Subono. Menurut dia, antrean pembeli BBM bersubsidi tidak akan terjadi bila sistem berjalan dengan baik.

"Masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah hanya memberlakukan pembatasan volume saja. Pengisian bisa dilakukan di SPBU mana saja."

Dalam rangka menuju realisasi program itu, pemerintah segera melakukan *beauty contest* konsultan yang akan menangani penyiapan perangkat yang akan digunakan dalam implementasi kartu pintar bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar.

Konsultan tersebut akan terlibat dalam pengadaan hingga instalasi peranti keras dan lunak pada kendaraan dan SPBU. Instalasi harus dilakukan sejak tiga bulan sebelum SPBU tertentu mengimplementasikan kartu pintar, yang ditandai dengan kontrak tertulis antara SPBU pelaksana dan BPH Migas.

Yoyo Waluyo Basuki, Direktur Utama PT Aplikasi Lintasarta, menuturkan ide Pertamina merupakan langkah terobosan yang patut dihargai.

"Idenya bagus karena bisa di *link* dengan fungsi-fungsi lainnya misalnya pembayaran atau asuransi dan penerimaan," ujarnya. (rudi.ariffianto@bisnis.co.id/roni.yunianto@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYAKARAH
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T. 4

TAHUN 2008

HET elpiji Riau akan ditinjau

PEKANBARU: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau akan meninjau harga eceran tertinggi (HET) elpiji untuk Provinsi Riau seiring kenaikan harga bahan-bahan yang memengaruhi biaya produksi dalam waktu dekat

Hendri Rustam, Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri (Disperindag) Provinsi Riau, mengatakan Pertamina sebenarnya telah merencanakan menaikkan harga elpiji Juli 2007. Harga elpiji di daerah itu Rp51.000 per tabung 12 kg. Harga itu nantinya akan berkisar Rp55.000-Rp60.000 per tabung 12 kg.

"Itu belum terealisasi dan baru direalisasikan pertengahan bulan ini. Disperindag telah menganalisis harga yang diusulkan Pertamina. HET itu berlaku setelah ada persetujuan Pemprov Riau," katanya pekan lalu. (BISNIS/12)

17

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7.4

TAHUN 2008

G-7 minta China, India, dan RI akhiri subsidi minyak

TOKYO: Negara-negara maju yang tergabung ke dalam Kelompok Tujuh meminta China, India dan Indonesia untuk mengakhiri subsidi minyak ke konsumen dari tingginya harga bahan bakar itu.

"Kebijakan fiskal dengan harga energi di dalam negeri yang lebih rendah dan bersifat artifisial harus dihindari. Itu berlawanan dengan kondisi pasar," kata Menteri Keuangan dan Bank Sentral Kelompok Tujuh kemarin.

Chief Asia Economist dari Societe Generale Hong Kong Glen Maquire menambahkan pemberian subsidi minyak oleh pemerintah China, India dan Indonesia telah memberikan permintaan ke tingkat yang tinggi dan bersifat artifisial.

Selain soal subsidi, kelompok negara-negara maju itu juga meminta OPEC untuk menaikkan kapasitas pengilangan dan produksinya. Namun, kata salah satu menteri perminyakan negara OPEC, organisasi itu kemungkinan akan memotong produksinya agar harga minyak dunia tetap terjaga di level US\$80 per barel pada pertemuan OPEC bulan depan.

(Bloomberg/ft)

China (2006)
2,0

India
2,8

Indonesia
11,5

Subsidi minyak
China, India,
dan RI
(US\$ miliar)



Sumber: International Energy Agency BISNIS/ADI PURDIYANTO

HUBUNGAN MASYAKAKA I
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 23

TAHUN 2008

Penyimpangan Solar Bersubsidi Dibongkar

TULUNGAGUNG (MI): Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung, Jawa Timur, membongkar praktik pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi oleh PT Bian Niaga Batuan yang merugikan negara Rp3 miliar, kemarin.

Dua pelaku yang bertugas membeli dan mengangkut bahan bakar tersebut kemarin terus diperiksa. Menurut rencana, hari ini petugas juga akan memeriksa pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Campurdarat yang melayani pembelian tersebut.

Selain itu, petugas menyita satu unit mobil pikap Chevrolet bernomor polisi L 9804 Q beserta puluhan jeriken berisi solar sebagai barang bukti.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tulungagung Ajun Komisaris Slamet Riyadi mengatakan perusahaan pengolah marmer yang beralamat di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, minimal membeli solar tiga kali dalam seminggu. Setiap kali perusahaan membeli 825 liter senilai Rp11.117.600 atau Rp33.352.800 per minggu.

"Mereka membeli solar bersubsidi dengan harga Rp4.300 per liter. Padahal, seharusnya industri membeli dengan harga Rp6.900 per liter. Jadi ada selisih kerugian negara Rp2.600 per liter. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas," kata Slamet Riyadi.

Berdasarkan hasil pemeriksa-

an terhadap sopir pengangkut BBM tersebut, ujarnya, PT Bian Niaga Batuan melakukan praktik tersebut sejak tiga tahun lalu. Dengan demikian negara dirugikan sekitar Rp3 miliar.

Menurut Slamet, pihaknya akan terus menelusuri kemungkinan terjadinya penjualan solar serupa ke perusahaan lain.

Minyak tanah

Sementara itu, warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, masih kesulitan mendapatkan minyak tanah. Untuk bisa membeli jatah 5 liter BBM tersebut

mereka harus antri hingga berjam-jam di pangkalan. Salah satu pangkalan minyak tanah yang diantre calon pembeli pada Sabtu (9/2) antara lain berada di Kelurahan Punggolaba, Kecamatan Kendari Barat.

Salma, 43, salah seorang warga Kelurahan Punggolaba, mengaku belakangan ia dan warga lainnya memang harus antri

untuk mendapatkan minyak tanah. BBM sebanyak 5 liter itu harus cukup untuk kebutuhan satu minggu karena ia hanya boleh antri setiap Sabtu.

Pemilik pangkalan, Abdullah, membenarkan pangkalannya memang hanya pendapat pasokan tiga drum atau sekitar 300 liter minyak tanah setiap minggu. Padahal kebutuhan warga jauh lebih tinggi daripada jumlah pasokan. Agar semua warga mendapat bagian, ia terpaksa membatasi pembelian maksimal 5 liter per orang.

(ES/HM/N-1)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																								
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF																									
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">JAN</td> <td style="width:10%; text-align: center;">FEB</td> <td style="width:10%;">MAR</td> <td style="width:10%;">APR</td> <td style="width:10%;">MEI</td> <td style="width:10%;">JUN</td> <td style="width:10%;">JUL</td> <td style="width:10%;">AGST</td> <td style="width:10%;">SEPT</td> <td style="width:10%;">OKT</td> <td style="width:10%;">NOV</td> <td style="width:10%;">DES</td> </tr> <tr> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td>12 13 14 15</td> <td>16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11	12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31								
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11	12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																						
HALAMAN : 20 TAHUN 2008																									

Maret 2008 Beroperasi LPG Storage Eretan Berkapasitas 10 Ribu

LPG storage Pertamina kawasan Pantura Jawa Barat yang terletak di Eretan akan beroperasi Maret 2008. Tangki darat jenis *pressurized* (memberi tekanan) memiliki kapasitas 10.000 matrik ton.

"Yang di Eretan itu tanki darat, *pressurized* tank. Kapasitasnya 10.000 MT, Maret depan beroperasi," kata Deputi Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina, Hanung Budya.

Tangki ini merupakan langkah awal sebelum nantinya dibangun tanki *refrigerated* (pendingin) yang berkapasitas lebih besar, sampai 120.000 matrik ton.

Awalnya Pertamina sudah meneken nota kesepahaman dengan Itochu, tapi hingga kini belum menentukan dengan pasti siapa yang akan digandengnya. "Belum tentu dengan Itochu," tambahnya.

Selain di Jawa Barat, Pertamina juga akan membangun LPG storage di Jawa Timur. Namun nampaknya negosiasi pembangunan LPG storage di Jawa Timur ini tidak semulus di Eretan.

Sebelumnya, Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina, Ahmad Faisal menjelaskan, setidaknya ada empat perusahaan yang berminat untuk ikut membangun LPG storage di Jawa Barat. Perusahaan tersebut adalah BP Plc, SK Corp, Conoco-Philips, dan Petronas. ● MAF

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI Premium Terlarang untuk Mobil Pribadi di Atas 2.000 cc

"Kebijakan sesaat, seperti pemadam kebakaran saja."

JAKARTA — Pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar akan diberlakukan terhadap tiga kategori kendaraan. Ketiga kategori tersebut adalah kendaraan pribadi, angkutan umum, dan kendaraan usaha. Penjatahan pembelian bahan bakar untuk kendaraan pribadi disesuaikan dengan jenis kendaraan.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Adi Subagyo, mengatakan kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin di atas 2.000 cc dilarang membeli bensin premium. Kendaraan tersebut diharuskan membeli bahan bakar jenis pertamax atau pertamax plus. "Kendaraan di bawah 2.000 cc boleh membeli premium, tapi dibatasi," katanya kepada *Tempo*.

Pembatasan pembelian premium dilakukan menggunakan kuota sesuai dengan kartu pintar (*smart card*). Jika pembelian premium melebihi kuota, kata Adi, konsumen harus membeli bahan bakar selain premium. Pembatasan penggunaan bahan bakar bertujuan menghemat subsidi sekitar Rp 10 triliun.

Adi menjelaskan, khusus angkutan umum, kuota pembelian premium atau solar lebih besar daripada kendaraan pribadi. Menurut dia, pihaknya akan segera melakukan pendataan kebutuhan bahan bakar kendaraan untuk angkutan. "Misalnya, jatah mikrolet dan bus akan berbeda," katanya.

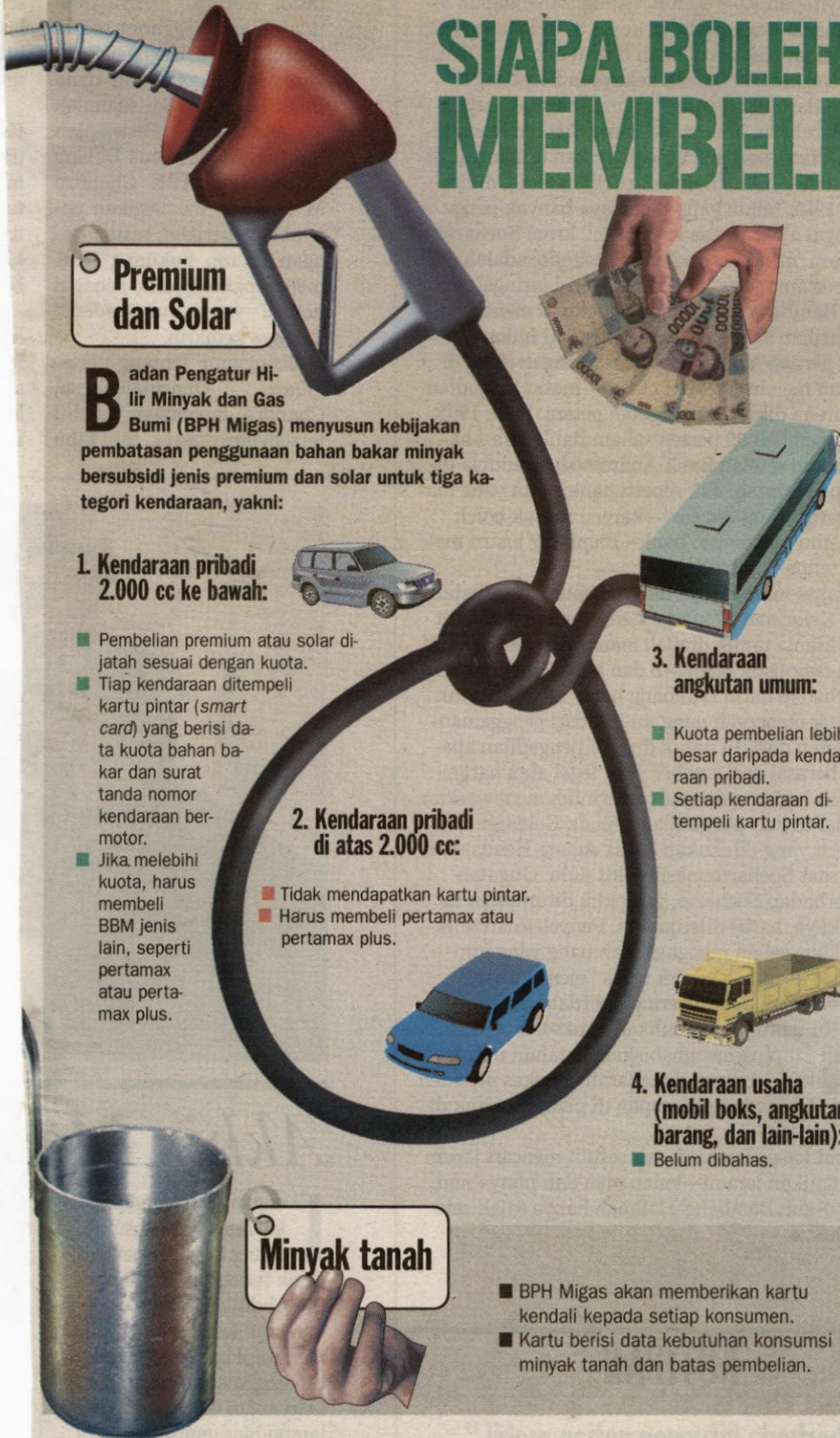
Adapun untuk kendaraan usaha, seperti mobil boks, BPH Migas masih belum membahasnya. "Masih kami kaji," ujar Adi.

Hingga kini BPH Migas belum memutuskan target penghematan subsidi bahan bakar minyak dan pembatasan kuota premium atau solar. "Kami masih menunggu persetujuan pemerintah, mau hemat berapa untuk premium dan solar," katanya. Pembatasan akan dilakukan berdasarkan pendataan kendaraan yang bisa membeli premium atau solar.

Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis ragu akan efektivitas rencana ini. Dia menilai kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar bersubsidi tersebut disusun tanpa perencanaan matang. "Kebijakan sesaat, seperti pemadam kebakaran saja," ujarnya kepada *Tempo* kemarin.

Menurut Emir, sistem kartu pintar tak akan efektif dan menimbulkan kerawanan penyalahgunaan. "Sudah mengeluarkan

SIAPA BOLEH MEMBELI



Premium dan Solar

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyusun kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar untuk tiga kategori kendaraan, yakni:

1. Kendaraan pribadi 2.000 cc ke bawah:

- Pembelian premium atau solar di-jatah sesuai dengan kuota.
- Tiap kendaraan ditempel kartu pintar (*smart card*) yang berisi data kuota bahan bakar dan surat tanda nomor kendaraan bermotor.
- Jika melebihi kuota, harus membeli BBM jenis lain, seperti pertamax atau pertamax plus.



2. Kendaraan pribadi di atas 2.000 cc:

- Tidak mendapatkan kartu pintar.
- Harus membeli pertamax atau pertamax plus.



3. Kendaraan angkutan umum:

- Kuota pembelian lebih besar daripada kendaraan pribadi.
- Setiap kendaraan ditempel kartu pintar.



4. Kendaraan usaha (mobil boks, angkutan barang, dan lain-lain):

- Belum dibahas.



Minyak tanah



- BPH Migas akan memberikan kartu kendali kepada setiap konsumen.
- Kartu berisi data kebutuhan konsumsi minyak tanah dan batas pembelian.

biaya, tidak efektif lagi," katanya.

Wakil Ketua Komisi Energi DPR Sutan Bathoegana mengatakan, jika kebijakan ini akan dilaksanakan, pemerintah perlu menyiapkan bank data pemilik kendaraan dan sanksi tegas bagi yang menyelewengkan.

Hingga kini, kata Sutan, pemerintah belum meminta pendapat DPR soal pelaksanaan program tersebut. Yang dibahas baru penggunaan kartu pintar untuk minyak tanah rumah tangga. Komisi Energi telah me-

nyetujui anggaran survei Rp 150 miliar untuk menentukan sasaran keluarga penerima subsidi.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai kebijakan pemerintah ini terlalu tergesa-gesa. "Tak terencana dengan baik," ujarnya. Dia khawatir terjadi kekacauan sosial yang luas karena pemerintah tak memiliki data akurat tentang pengguna BBM bersubsidi.

● ALI NY | NIEKE INDIETTA | DWI RIYANTO | KURNIASIH BUDI | ANTON APRINATO | REH ATEMALEM SUSANTI

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Konsepnya Belum Teruji Secara Akurat Pembatasan BBM Bisa Timbulkkan Inflasi

Pemerintah diminta tidak terkecoh akan kenaikan harga-harga pangan yang menyedot subsidi lebih besar dengan menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi via *smart card*. Inflasi pun bisa terjadi.

Komite Indonesia untuk Pengawasan dan Penghematan Energi (KIPPER) meminta pemerintah mengkaji lebih mendalam konsep pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan *smart card* (kartu pintar). Konsep ini dinilai belum teruji secara akurat.

"Membengkaknya subsidi ini jangan menimbulkan kepanikan pemerintah, sehingga disodorkan konsep *smart card* yang belum teruji seperti apa," tandas Sekjen KIPPER, Sofyano Zakaria di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kajian program ini betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan dan jangan hanya melihat dengan gagasan ini bisa menghemat subsidi BBM saja, tapi juga harus diperhatikan ongkos sosial politiknya.

Diakuinya, saat ini memang perlu disepakati bahwa mobil mewah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi, namun perlu ada justifikasi secara jelas. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah tak perlu ragu mengeluarkan kebijakan terhadap kendaraan mewah itu. Misalnya, melalui Perpres yang melarang penggunaan BBM bersubsidi.

Diingatkannya, perlu adanya kategori yang jelas terkait kendaraan mewah itu, apakah mobil yang memiliki 2000 cc ke atas dikategorikan mobil mewah.

"Tapi bagaimana untuk bermerk seperti Mercy tahun 2005 yang diatas 2000 cc tapi harganya di bawah mobil Inova atau Avanza," imbuhnya.

Selain itu, menurut Sofyano, pemerintah perlu melanjutkan terobosan penghematan energi dengan menjalankan program diversifikasi. Dicontohkannya, kendaraan umum dan pribadi didorong beralih ke penggunaan gas dari BBM.

"Bisa saja, angkutan umum diharuskan mengganti bahan bakar minyak ke gas. Tapi kalau melalui pembatasan BBM dampak sosial politiknya akan semakin besar ketimbang krisis kelat, minyak goreng atau terigu," ujarnya.

Rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) untuk bensin dan solar bersubsidi diprediksi akan bisa memicu inflasi. Dengan adanya pembatasan tersebut peluang pemakaian BBM non subsidi terutama untuk kendaraan niaga akan semakin tinggi sehingga secara tidak langsung mendongkrak harga barang.

"Hal ini bisa memicu inflasi, karena peluang pemakaian kendaraan niaga, akan lebih banyak memakai BBM non subsidi (Pertamax) karena pembatasan 5 liter pasti akan jauh dari kebutuhan. Kalau ongkos trans-

22



Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono usai memberikan keterangan tentang rencana pembatasan Premium di SPBU Gatot Subroto Jakarta, Sabtu (9/2). JPNN

portasi naik harga pun naik," kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Bambang Trisulo.

Menurutnya kebijakan ini setidaknya akan mempengaruhi pola konsumsi BBM, sehingga akan ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama jatah kebutuhan BBM subsidi setiap kendaraan akan dicampur dengan yang non subsidi untuk menambal kebutuhan harian. Kedua akan ada peluang pembelian BBM pompa bensin liar, untuk menambah kekurangan kebutuhan.

"Intinya dua kemungkinan tersebut akan sama-sama mendorong harga transportasi yang

lebih tinggi," imbuhnya.

Tetapi ia menggaris bawahi target pertumbuhan 20 persen untuk penjualan mobil tahun 2008 yang diperkirakan akan mencapai 500 ribu unit akan sangat tergantung berapa besar inflasi yang terjadi.

"Target pertumbuhan 20 persen konsumsi mobil tahun ini, kami patok pada asumsi inflasi maksimal 7 persen, sehingga kalau bisa naik di atas itu secara tidak langsung pasti ada dampaknya," ujarnya.

Tapi, Bambang tidak berani memprediksi sejauh mana dampak terhadap penjualan mobil tahun ini. "Kita lihat saja selama tiga bulan pelaksanaan kebijakan ini, sejauh mana mempengaruhi

inflasi," ujarnya.

Menanggapi program pembatasan BBM bersubsidi tersebut, PT Pertamina (Persero) menyatakan penerapan sistem tertutup harus dipastikan tidak menyebabkan antrian panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan pangkalan.

"Kita minta program ini disusun dengan baik, karena kita tidak ingin jika penerapan *smart card* akan mengakibatkan antrian di SPBU, nanti Pertamina lagi yang disalahkan," kata Direktur Utama Pertamina, Ari H Soemarno. Penghematan dari sistem distribusi tertutup ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 10 triliun. ● MAF/REN

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI

Penerapan Smart Card Sangat Rawan Kekacauan

JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah bahwa pembatasan premium dan solar bersubsidi dengan menggunakan kartu pintar (smart card) berpotensi menimbulkan kekacauan jika tidak dipersiapkan dengan matang.

Pasalnya, distribusi di lapangan diperkirakan akan jauh dari apa yang diharapkan. Dampaknya, sistem distribusi secara tertutup itu bisa menimbulkan perekonomian menjadi stagnan.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI Alvin Lie menanggapi program penghematan subsidi BBM melalui pola pembatasan tertutup. "Ekonomi akan stagnan dan inflasi tinggi. Kondisi saat ini semakin kalut, karena ini masalah sangat sensitif," ujar Alvin Lie di Jakarta, kemarin.

Kekhawatiran lain, sebelumnya disampaikan Dirut Pertamina Ari H Soemarno. Menurut dia, jika tidak disiapkan dengan matang, maka akan terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya. "Kalau terjadi antrian di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), nanti Pertamina juga yang disa-

lahkan," katanya.

Pertamina, diakuinya, akan menjadi tumpuan kekesalan masyarakat jika terjadi kekacauan program karena BUMN itulah yang menjual BBM ke konsumen. Namun, Ari mengatakan, jika disiapkan secara matang dan dilakukan bersama-sama pihak terkait, maka pembatasan premium dan solar bisa dilakukan dengan baik.

Alvin Lie memperkirakan, pemakaian smart card akan menimbulkan kekacauan di lapangan yang berakibat distribusi premium dan solar akan terganggu. Misalnya, uji coba pemerintah membatasi premium beberapa waktu lalu yang terbukti gagal total dan program konversi minyak ke elpiji juga morat-marit.

Hal senada juga diungkapkan Komite Indonesia untuk Pengawasan dan Penghematan Energi Sofya-

no Zakaria. Menurut Sofyano, konsep pembatasan dengan smart card belum teruji secara akurat sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan.

"Jangan hanya melihat penghematan subsidi BBM saja, tapi harus dilihat ongkos sosial politik yang mungkin ditimbulkannya," katanya.

Sofyano menyarankan, agar pemerintah melarang saja mobil mewah menggunakan BBM bersubsidi dengan dukungan berupa peraturan presiden (Perpres).

"Membengkaknya subsidi ini jangan menimbulkan kepanikan pemerintah, sehingga mau saja disodori konsep smart card yang belum teruji seperti apa. Kita semua memang berharap pemerintah SBY-JK mampu memperbaiki perekonomian tahun 2008, tapi jangan sampai malah merusak situasi," ujar Sofyano.

Hal lain yang bisa dilakukan adalah mendorong kendaraan umum dan pribadi menggunakan bahan bakar gas (BBG). "Kedua usulan itu saya kira dampak sosial politiknya tidak akan sebesar jika pemerintah tetap memaksakan

pembatasan BBM dengan smart card," katanya.

Selain itu, Alvin juga menyalskan sikap pemerintah yang tidak mengajak bicara DPR sebelum mengambil keputusan seperti itu. "Keputusan ini terlalu terburu-buru, karena sebelumnya pemerintah sudah terlanjur mengambil langkah popularitas dengan mengatakan bahwa hingga 2009 harga BBM tidak akan naik. Dan itu dilakukan tanpa mengukur kemampuan APBN," ujarinya.

Alvin mengatakan, eksperimen pemerintah untuk pembatasan minyak tanah beberapa waktu lalu terbukti gagal total, sementara program konversi minyak ke elpiji juga morat-marit. "Kok sekarang mau main-main dengan premium dan solar lagi. BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas harus bekerja keras dan pontang-panting untuk memenuhi kebijakan populis SBY ini," kata dia.

Alvin juga menghimbau agar pemerintah menimbang apakah investasi komputerisasi on line untuk membaca smart card sudah sepadan dengan penghematan yang akan didapat. (Abdul Choir)

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

Penghematan Premium di Bawah Target

Seperempat triliun rupiah
 untuk mencetak dan
 distribusi *smart card*.

JAKARTA — Penerapan sistem kartu kendali atau *smart card* untuk pengurangan subsidi bahan bakar minyak diperkirakan tidak efektif. Penghematan tidak akan mencapai Rp 10 triliun seperti yang ditargetkan pemerintah.

Jumlah penghematan, menurut anggota Komite Bidang Keuangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Anggono Nugroho, bergantung pada cakupan distribusi kartu pintar. Penghematan Rp 10 triliun, menurut dia, hanya bisa tercapai jika program ini diberlakukan di seluruh Jawa-Bali pada Mei-Desember 2008.

"Apabila cakupan wilayah dan tenggang waktu kurang dari itu, penghematan yang bisa dilakukan kurang dari Rp 10 triliun," katanya kepada *Tempo* di Jakarta kemarin.

Kebijakan politik pemerintah, Ang-

gono menjelaskan, juga sangat menentukan efektivitas program. "Apabila banyak yang memprotes," kata Anggono, "apakah pemerintah akan terus konsisten dengan rencananya?"

Akhir tahun lalu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Paskah Suzetta menyatakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, yang dimulai awal 2008 di Jabodetabek. Penghematan yang bisa dilakukan sekitar Rp 6 triliun pada semester pertama.

Rabu lalu pemerintah memutuskan berhemat dari pemotongan subsidi demi menyokong kebijakan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Target penghematan, Rp 10 triliun dari pemotongan subsidi bahan bakar dan Rp 10 triliun dari penghematan listrik.

Keputusan diambil dalam rapat selama empat jam yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya. Rapat itu juga memutuskan penggunaan *smart card* dalam penghematan subsidi, April nanti di Jabodetabek.

Hanya kendaraan pribadi yang ditempel kartu pintar plus angkutan

umum yang boleh membeli bahan bakar bersubsidi.

Anggono memperkirakan pemerintah membutuhkan dana tambahan sekitar Rp 250 miliar untuk mencetak dan mendistribusikan kartu pintar. "Masih terus dibicarakan dengan Departemen Keuangan," katanya sambil menjelaskan program kartu pintar ini baru bisa dilaksanakan pada Mei 2008.

Pemangkasan subsidi secara selektif ini dikritik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pemerintah dinilai tak berani mengoreksi janji tak menaikkan harga bahan bakar hingga 2009. "Ini kan politis, karena tahun depan ada pemilu. Padahal kenaikan harga minyak dunia sudah terjadi," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kemarin.

Tulus mengusulkan mengganti minyak untuk pembangkit listrik dengan gas. Tulus yakin penggunaan gas pada pembangkit listrik akan bisa menghemat subsidi jauh di atas Rp 10 triliun. ● JOEPIE SUGIHARTO | YULIAWATI | RIEKA RAHADIANA

24

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 17

TAHUN 2008

Pembatasan BBM Perlu Revitalisasi Transportasi

Pemerintah Masih Bisa Tekan Subsidi BBM

JAKARTA, KOMPAS — Rencana penghematan subsidi bahan bakar minyak dengan membatasi pemakaian seharusnya diikuti dengan revitalisasi sarana transportasi massal. Tanpa revitalisasi, rencana pembatasan BBM tidak akan bisa menyokong program penghematan energi dalam jangka panjang.

"Pembatasan BBM yang akan diterapkan memang sifatnya mencari upaya penghematan BBM dalam jangka pendek. Rencana jangka pendek ini harus disertai perhitungan keuntungan dan kerugian. Jangan sampai aksi jangka pendek ini tidak *nyambung* dengan kondisi jangka panjangnya," ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Susantono saat dihubungi Minggu (10/2).

Pemerintah menargetkan bisa menghemat subsidi BBM sebesar Rp 10 triliun melalui program pembatasan pemakaian premium dan minyak solar subsidi.

Tanpa ada pembatasan, konsumsi BBM tahun ini diperkirakan mencapai 39 juta kiloliter dan subsidi bisa naik dari Rp 45 triliun menjadi Rp 116 triliun.

Bambang mengemukakan, penggunaan kendaraan pribadi secara berlebihan disebabkan masyarakat tidak memiliki alternatif angkutan umum yang aman,

nyaman, dan terjadwal.

"Kalau memang pemerintah ingin mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, syaratnya harus ada pembenahan secara menyeluruh terhadap angkutan umum," ujarnya.

Solusi jangka panjang

Perbaikan transportasi massal, lanjut Bambang, merupakan solusi jangka panjang dalam upaya penghematan energi dan perbaikan lingkungan.

Menurut dia, ada dua pola yang bisa dikembangkan. Pertama, pemerintah tetap berfungsi sebagai regulator dengan pelaksana transportasi massal diserahkan ke swasta. Kedua, pemerintah melalui perusahaan publik mengambil alih pengelolaan tugas angkutan umum utama kota.

"Pemerintah bisa menerapkan model angkutan massal, seperti bus dan kereta api listrik, yang terintegrasi. *Feeder*-nya diserahkan ke swasta," ujar Bambang.

Pemerintah hanya memiliki

PERHITUNGAN SUBSIDI BBM

◆ MOPS (Dollar AS/bbl)	
a. Premium	87,38
b. Kerosene	95,22
c. Solar	91,58
◆ MOPS + alpha (9 Dollar AS)	
a. Premium	96,38
b. Kerosene	104,22
c. Solar	100,58
◆ Volume BBM (Juta KL)	35.837
a. Premium	16.950
b. Kerosene	7.887
c. Solar	11.000

Sumber: Pertamina

konsep, tetapi lemah dalam aplikasi. "Masalahnya memang pada pengoptimalan, misalnya, bagaimana *busway* diintegrasikan dengan KRL. Sekarang ini kan tanaman aplikatifnya tidak muncul," ungkap Bambang.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monarfa menilai pemerintah masih bisa menekan subsidi BBM melalui perubahan patokan margin keuntungan (*alpha*).

"Patokan margin 13,5 persen itu kan ditetapkan ketika asumsi harga minyak masih 60 dollar AS. Masa harga 80 dollar AS, Pertamina tetap dikasih segitu," ujar Suharso.

25



KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Produksi tabung elpiji 12 kilogram di Pabrik Tabung Elpiji Pertamina, Jakarta, Jumat (8/2). Untuk memenuhi permintaan tabung di seluruh Indonesia, setiap hari pabrik ini memproduksi sekitar 14.000 tabung elpiji 12 kilogram.

Ia mengusulkan, *alpha* ditetapkan di satu angka yang tetap, bukan persentase. Berdasarkan simulasi perhitungan *alpha* 9 dolar AS per barrel, volume BBM 35,8 juta kiloliter, patokan harga minyak 80 dolar AS per barrel,

dan nilai tukar Rp 9.200, subsidi BBM hanya sekitar Rp 84 triliun. "Memang dengan cara ini akan ada penurunan keuntungan Pertamina, tetapi dividen kan baru dinikmati pemerintah pada tahun 2009," ujarnya. (DOT)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 117

TAHUN 2008

Natuna D Alpha ke Pertamina

KONTRAK pemerintah dengan ExxonMobil di Blok Natuna D Alpha di Kepulauan Riau berakhir. Meski negosiasi memakan waktu hingga setahun, kedua pihak gagal mencapai kesepakatan untuk memperpanjang pengelolaan ladang gas. Selanjutnya, pemerintah menunjuk Pertamina untuk mengelola blok tersebut, sekaligus mencari mitra strategis yang meng-

untungkan.

Negosiasi mentok lantaran tidak ada kecocokan soal bagi hasil migas. Tim perunding pemerintah menghendaki porsi bagi hasil pemerintah dan kontraktor 65:35, tetapi kontraktor tidak bersedia. Perundingan kedua pihak terkendala oleh tidak adanya kesepakatan soal harga gas dan calon pembeli. Dalam kontrak lama, Exxon memperoleh bagi hasil 100 persen. Kontrak Blok Natuna telah berakhir pada 2005.

Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno mengaku siap ditunjuk pemerintah untuk mengelola Blok Natuna. Untuk itu, pihaknya akan mencari pendanaan, sekaligus mitra strategis. Salah satunya alternatifnya bermitra dengan Exxon. Juru bicara ExxonMobil, Deva Rahman, menyambut baik rencana Pertamina tersebut. "Ada kemungkinan kami bisa bekerja bersama Pertamina," kata Deva kepada Nieke Indrieta dari *Tempo*. ■

26

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOG
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

Gerai

Chevron Siapkan 525 Sumur untuk Genjot Produksi

PERUSAHAAN minyak dan gas asal Amerika Serikat, Chevron Pacific Indonesia (CPI), menyiapkan 525 sumur minyaknya untuk menggeber target produksi 403.000 barel per hari (bph). "Target realistisnya memang segitu," ungkap Presiden CPI Suwito Anggoro dalam siaran pers, Ahad (10/2).

Tahun lalu, Chevron sukses membukukan angka produksi minyak sampai 425.000 bph dari target awal sebanyak 415.000 bph. Tercapainya angka produksi minyak sebesar itu berkat peningkatan aktivitas pengeboran hingga 365 sumur. Sumur-sumur baru mampu mendongkrak produksi rata-rata 14.000 bph. "Target awal tahun lalu hanya 284 sumur," jelas Suwito.

Dalam kontrak dengan BP Migas, target CPI harusnya sebanyak 414.000 bph. Untuk memenuhi target itu, paling tidak Chevron membutuhkan sekitar 700-an sumur minyak.

Ruisa Khoiriyah

27

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOG
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

BBM: Kartu Pintar vs Kenaikkan Harga?



Dr Sri Adiningsih
 Kepala Pusat Studi Asia-Pasifik
 UGM

Bahan bakar minyak (BBM) sudah menjadi bagian penting bagi penerimaan APBN kita sejak merdeka, sementara penerimaan negara dari pajak menjadi penting sejak reformasi perpajakan diluncurkan pada pertengahan 1980-an. Selain itu, salah satu sumber penerimaan ataupun pendanaan APBN yang "selalu" defisit sejak kemerdekaan berasal dari utang domestik dan utang luar negeri. Tidak mengherankan jika utang kita semakin meningkat, meskipun komposisinya berubah, dari utang luar negeri menjadi utang domestik, dari utang antarnegara atau pemerintah, ataupun *official* menjadi utang pada pasar keuangan (surat utang negara). Bunga yang harus dibayar juga semakin mahal, selain risiko pasarnya juga semakin besar, meski pemerintah dapat membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI).

Naiknya harga BBM di pasar internasional yang pernah menembus lebih dari USD100, yang dibarengi dengan krisis pasar keuangan AS, dan kenaikan harga-harga komoditas primer di pasar internasional, telah membuat banyak pihak "ketar-ketir", termasuk otoritas ekonomi Indonesia. Pemerintah mesti mempercepat revisi APBN yang baru berjalan sekitar satu bulan, itu pun dengan berbagai skenario yang masih belum jelas. Pemerintah belum memiliki strategi jelas dalam menghadapi berbagai perkembangan, sehingga beritanya masih simpang siur—yang tentu saja membingungkan kita

semua. Apalagi berbagai asumsi yang akan dipakai masih terus berubah—yang menunjukkan pemerintah belum memiliki strategi yang solid. Padahal, bagi masyarakat dan dunia usaha, apa pun langkah yang akan diambil otoritas ekonomi adalah penting karena dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis atau mengelola keuangan keluarga.

Karena itu, strategi dari otoritas ekonomi dalam mengatasi berbagai kemelut ini ditunggu oleh banyak pihak, diharapkan dapat *mengayem-ayemi* kita yang merasa waswas dengan masa depan kehidupan. Pengalaman menunjukkan kesalahan kebijakan pada 2005 yang lalu harus kita bayar sangat mahal. Padahal, masalah yang kita hadapi pada saat ini lebih berat daripada tahun 2005. Apalagi, suasana sosial politik juga sudah mulai menghangat menjelang Pemilu 2009, sehingga efektivitas kebijakan dapat lebih buruk. Pada saat yang sama, "masalah" di Bank Indonesia (BI) jika tidak berhati-hati dapat juga membuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal akan semakin sulit dilakukan.

BBM Riwayatmu Dulu

Kenaikan harga BBM yang tajam telah memengaruhi perekonomian akhir-akhir ini—meskipun banyak negara maju, bahkan importir BBM saja mampu mengatasinya dengan baik sehingga dampaknya pada perekonomian mereka tidak terlalu signifikan seperti AS, Singapura, bahkan Jepang, pada 2005 lalu. Ekonomi dunia juga masih tumbuh pesat sampai tahun lalu. Berbeda dengan kenaikan harga BBM yang tajam pada pertengahan 1970-an yang membuat ekonomi dunia dan banyak negara mengalami tekanan

yang berat. Ini artinya banyak negara yang telah belajar dengan baik dari kenaikan harga BBM yang lalu.

Sebaliknya, Indonesia justru mengengaskan. Pada waktu harga BBM melesat di pertengahan 1970-an, kita mendapatkan rezeki nomplok. Pemerintah Orde Baru diuntungkan dengan uang minyak, sehingga dapat membangun ekonomi Indonesia dengan pesat, meskipun didukung pula oleh utang luar negeri pada saat harga minyak agak merosot. Namun, secara umum Indonesia diuntungkan dengan naiknya harga BBM seperti halnya dengan negara-negara Timur Tengah pada saat itu. Namun, ketidakmampuan mengelola sumber daya alam yang baik, khususnya dalam bidang energi, atau karena masalah manajemen transportasi yang buruk membuat kenaikan harga BBM sekarang justru menjadi momok bagi pemerintah pusat.

Kebijakan Kartu Kendali: Jawaban?

Berbagai perkembangan dalam ekonomi domestik dan internasional telah membuat beban APBN semakin berat, padahal jumlah pengangguran dan penduduk miskin masih besar. Karena itu pemerintah sudah mengusulkan perlunya revisi APBN supaya dapat menekan defisit. Ada banyak wacana menyikapi perkembangan harga BBM untuk mengurangi defisit APBN dan mengurangi beban hidup masyarakat. Salah satunya dengan program kartu kendali (*smart card*). Dengan kartu ini diharapkan konsumsi BBM berkurang sekitar 10% karena setiap kendaraan pribadi atau kendaraan umum akan mendapatkan jatah pembelian setiap periodenya dengan suatu rumusan yang akan ditentukan, dengan sistem *online* ke semua stasiun pengisian bahan bakar

29

umum (SPBU). Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi beban subsidi yang perlu dibayar oleh pemerintah pusat.

Bisa dibayangkan betapa rumitnya rumusan yang harus dibuat pemerintah untuk membuat suatu kemayang dirasakan adil, tidak mengganggu kelancaran roda perekonomian, dan tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Pasti akan tidak mudah. Lihat saja membuat dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) saja tiap tahun kita masih "gegeran" saja, padahal hanya melibatkan sekitar 500 pemerintah daerah. Pada kasus ini kita membicarakan skema untuk lebih dari lima juta kendaraan bermotor roda empat, sekitar 20 juta kendaraan bermotor roda dua. Belum lagi untuk kapal dan perahu nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Akan kompleks sekali. Mungkin negara jiran Malaysia dan Myanmar sudah dilaksanakan, tetapi pertanyaannya berapa volume yang mereka tangani? Seberapa efektif pula mereka dapat mengurangi konsumsi BBM?

Di samping itu masih muncul berbagai pertanyaan. Pertama, seberapa besar biaya *set up* dan pemeliharaannya? Apakah sistem yang baru ini akan *reliable* dan tahan terhadap serangan *hacker*? Potensi pasar gelapnya yang besar? Dan seterusnya dan seterusnya. *Toh*, soal harga BBM tetap tinggi ini hanya masalah waktu kapan Indonesia harus menaikkan harga BBM. Karena itu, daripada nanti akhirnya harga naik juga dan kita sudah mengeluarkan sumber dana yang besar beserta permasalahannya, lebih baik jika harga BBM naik pelan-pelan. Lebih dari itu semua, manajemen energi dan transportasi umum perlu dibenahi agar impor BBM dapat dikurangi. (*)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 117

TAHUN 2008

Subsidi untuk Kebutuhan Pokok

PEMERINTAH akan mengirit subsidi bahan bakar minyak dan listrik. Hasil pengiritan, minimal Rp 20 triliun, akan dialihkan ke program stabilisasi harga kebutuhan pokok. Penghematan itu masing-masing Rp 10 triliun dari subsidi BBM dan listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yugiartoro mengatakan, selain dari penghematan subsidi, pemerintah juga berharap sumber dana stabilisasi bahan pokok dari penerimaan tambang dan migas masing-masing Rp 5 triliun.

Penghematan subsidi BBM ini, menurut Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Tubagus Haryono, akan dikenakan ke bensin premium, kerosen, dan solar. "Pengaturannya menggunakan kartu kendali," katanya.

Direktur Utama PLN Eddie Widiono mengatakan, pengiritan subsidi listrik dilakukan dengan penggunaan lampu hemat energi sebanyak 51 juta lampu. Cara lainnya adalah dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dari 10,6 juta liter menjadi 9,5 juta liter tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menilai kebijakan

itu tidak akan berdampak apa pun, karena perubahan hanya terjadi dalam kas negara. "Seharusnya pemerintah segera sadar dan fokus dengan pengembangan pangan jangka panjang," katanya.

30



TEMPO/SANTIRIA M.

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

MINYAK BUMI INDONESIA

TAHUN 2008

Menjadi Raja "Emas Hitam"

Indonesia masih mengandalkan impor untuk menambal kekurangan pasokan dalam negeri. Nasionalisasi eksplorasi minyak dan gas bumi perlu dipertimbangkan.

BADAN Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) baru-baru ini menyatakan tetap akan mampu memproduksi (*lifting*) 1,05 juta barel minyak bumi per hari. Namun, target tersebut ditanggapi dingin banyak pihak. Tanggapan tersebut berpatokan pada ketidakmampuan BP Migas untuk memenuhi target tahun lalu sebesar 950.000 barel per hari.

Di lain pihak, pada 6 Februari lalu, pemerintah berencana memangkas anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik masing-masing sebesar Rp10 triliun. Pemangkasan subsidi tersebut tidak luput dari melonjaknya harga "emas hitam" ini yang pernah menyentuh angka USD100 per barel. Pemerintah pun dibuat *kelabakan* dan terpaksa merevisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 2008. Padahal, pemerintah akan melakukan revisi pada Juli.

Jika tidak direvisi, negara bisa makin terpuruk ke jurang defisit anggaran. Subsidi BBM bakal naik dari Rp45,8 triliun menjadi Rp116,8 triliun. Subsidi listrik akan mengalami hal yang sama, melonjak dari Rp29,8 triliun menjadi Rp54,2 triliun.

Minyak bumi dan produk olahannya akhirnya benar-benar menjadi barang langka dan mahal di negeri anggota Organization of Petroleum Exporter Country (OPEC) ini. Nostalgia masa-masa keemasan *oil boom* pada pertengahan 1980-an masih terus terngiang dan didentangkan banyak pihak.

Pada masa itu, Indonesia mengalami kemajuan ekonomi yang dahsyat dengan dana

dari hasil ekspor minyak. Bahkan, Pertamina menjelma menjadi perusahaan kelas dunia dan bak raja di dalam negeri. Praktis, minyak bumi menjadi bahan bakar denyut nadi bangsa ini pada saat itu.

Namun, saat ini keadaan berbalik 180 derajat. Minyak bumilah yang menjadi determinan utama sengsaranya bangsa ini, selain akumulasi kesalahan pengelolaan negara. Secara beruntun, bangsa ini dihantam kenaikan tarif dasar listrik dan kenaikan harga BBM yang selalu diikuti kenaikan harga di berbagai sektor.

Bahkan, rakyat sering kali harus bersusah payah mengantre untuk mendapatkan BBM yang makin mahal tersebut. Pemerintah pun harus memutar otak untuk mengerem konsumsi BBM yang kian mengkhawatirkan. Pembatasan pemakaian BBM menjadi wacana besar yang cukup cerdas, sekalipun membawa efek bola salju yang tidak dapat disepelekan. Di lain pihak, makin tingginya konsumsi automotif dalam negeri menjadi suatu paradoks bangsa ini.

Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengawasan

Mutlak, Indonesia harus menggenjot produksi minyaknya agar tidak kian terpuruk ganasnya harga di pasar dunia. Pemerintah harus mengawasi pelaksanaan berbagai kontrak yang telah dibrikan kepada rekanan. Jangan sampai rekanan hanya menumpuk kontrak kerja sama tersebut, atau bahkan lebih buruk mengalihkan hak eksplorasi tersebut ke pihak lain.

Selama ini yang juga sela-

31

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : R.5

TAHUN 2008

Organda tolak pembatasan BBM

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) menolak pembatasan bahan bakar (BBM) bersubsidi karena bisa berakibat *kolaps*-nya usaha angkutan umum.

Ketua DPP Organda Murphy Hutagalung menyatakan pihaknya meminta pemerintah mengkaji kembali rencana pembatasan pembelian BBM jenis premium dan solar yang akan diterapkan Mei mendatang.

"Kami sudah ajukan surat keberatan kepada pemerintah dan tetap meminta subsidi untuk angkutan umum. Kalau rencana pembatasan tetap diberlakukan, maka usaha ini makin terpuruk," katanya kepada *Bisnis*, kemarin

Meski Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah melibatkan Organda dalam pembahasan rencana pembatasan pembelian BBM, organisasi itu bersikeras menolak rencana tersebut.

Murphy mengungkapkan apabila kebutuhan BBM angkutan umum 80 liter per hari dan pembelian BBM subsidi dibatasi hanya 20 liter per hari, maka 60 liter sisanya harus dibeli dengan harga nonsubsidi.

"Kondisi tersebut semakin memberatkan usaha angkutan umum dari sisi biaya operasional, padahal di satu sisi tarif angkutan tidak mengalami kenaikan," tegasnya.

Organda menilai pemerintah perlu melihat kepentingan yang lebih luas, yaitu masyarakat, karena dengan naiknya belanja BBM secara otomatis

tarif angkutan pun harus ikut menyesuaikan.

Usaha angkutan umum sejauh ini sudah melakukan penghematan BBM dengan menambah kapasitas daya angkut kendati infrastruktur yang tersedia semakin rentan mengalami kerusakan.

Berdasarkan data Organda, jumlah operator angkutan umum di Indonesia sebanyak 1,5 juta perusahaan dengan tenaga kerja sekitar 16 juta orang. Dari jumlah tersebut, hanya 60% yang masih aktif beroperasi.

Murphy melanjutkan angkutan umum tidak sama dengan kendaraan pribadi karena membawa penumpang lebih banyak.

Dikaji kembali

"Kalaupun diganti menggunakan bahan bakar gas, apakah infrastrukturnya sudah memadai? Kami minta hal ini dikaji kembali," ujarnya.

Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Iskandar Abubakar menyatakan pembatasan pembelian BBM dapat saja diberlakukan asalkan angkutan umum mendapat jatah atau alokasi pembelian premium atau solar yang memadai sesuai dengan kebutuhan.

"Kalau diberi alokasi BBM yang terlalu rendah, tentunya memang berpengaruh ke tarif," ujarnya.

Dephub tengah melakukan survei untuk mendapatkan informasi rata-rata penggunaan BBM di setiap angkutan umum.

Hasil survei tersebut diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi BPH Migas. (09)

32

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

MINYAK MENTAH

G7 Minta OPEC Tambah Kuota

TOKYO – Sejumlah negara industri maju yang tergabung dalam G7 meminta Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/ OPEC) meningkatkan kuota produksi minyak mentah untuk mengatasi kenaikan harga minyak. Saat ini produksi OPEC kurang dari 30 juta barel per hari. Menteri-menteri keuangan G7 yang mengadakan pertemuan di Tokyo, Jepang, Sabtu (9/2), dalam salah satu draf kesepakatannya menyatakan, OPEC diminta menggenjot produksi, memperbaiki kapasitas kilang, dan meningkatkan efisiensi energi. "Hal tersebut harus dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak," tulis pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip AFP di Tokyo, akhir pekan lalu. Mengawali tahun ini, harga minyak sempat menembus US\$ 100 per barel, namun kembali merosot setelah ada penurunan permintaan akibat perlambatan ekonomi di AS. Menkeu-menkeu G7 juga tidak berniat menurunkan harga energi dalam negeri dengan cara pemotongan pajak ataupun pemberian subsidi. (her)

33

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2008

Kalbar Usul Impor Elpiji Dari Malaysia

NERACA

Singawang - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mengusulkan impor elpiji secara khusus dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan di provinsi tersebut yang selama ini hanya mengandalkan pasokan dari Jawa atau Sumatera.

"Kajian untuk itu memungkinkan dan nanti akan diusulkan dalam pertemuan reguler Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia)," kata Asisten II Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Kalbar, Ab-

dul Munir saat dihubungi, Minggu.

Namun, lanjutnya, kalau pun peluang tersebut terbuka perlu disepakati oleh pemerintahan kedua negara karena menyangkut kebutuhan strategis dan importasi. Menurut Munir, selama ini masyarakat di perbatasan Kalbar - Sarawak (Malaysia) lebih memilih untuk menggunakan elpiji asal Malaysia karena lebih murah dan isinya lebih banyak dibanding Pertamina.

Elpiji tersebut masuk melalui jalan setengah resmi maupun ilegal yang tersebar di sepanjang perbatasan ke-

dua negara, harga elpiji tersebut 26 RM (1 RM = Rp2.900-red).

"Masyarakat lebih suka membeli elpiji Malaysia karena isinya lebih banyak sekitar 16 kilogram dan harganya tidak jauh berbeda dengan elpiji Pertamina," kata pria yang memiliki usaha di Malaysia itu. Namun, lanjutnya, dalam beberapa pekan terakhir pihak Malaysia membatasi pembelian elpiji oleh masyarakat Indonesia.

Dalam sebulan terakhir, pasokan elpiji untuk Kalbar kerap mengalami gangguan karena cuaca buruk dan ter-

batasnya kapasitas tangki timbun di Stasiun Pengisian dan Penyaluran Elpiji Khusus (SPPEK) milik PT Gemilang Asia Sejahtera di Desa Wajok, Pontianak.

Sementara PT Pertamina Unit Pemasaran (UPms) VI mengungkapkan pada periode Januari 2008 terjadi kekurangan 24 ton elpiji di Kalbar setiap hari karena peningkatan pembelian serta terbatasnya kapasitas SPPEK. Berdasarkan data empat bulan terakhir, kebutuhan elpiji di Kalbar rata-rata 40 ton per hari. SPPEK memiliki tangki timbun berkapasitas 250 ton

dan satu kapal tongkang 200 ton. Elpiji dipasok dari kilang di Plaju, Sumatera Selatan.

Namun, selama Desember 2007 terjadi pengurangan stok maupun pasokan karena cuaca buruk di Laut Cina Selatan. Sempat pula terjadi kekosongan pasokan selama tiga pekan. Abdul Munir mengatakan, usulan tersebut masih dibahas di instansi teknis Pemprov Kalbar. "Kalaupun ada penetapan, namanya mungkin juga bukan HET," kata Abdul Munir. Penetapan harga tertentu itu untuk menjamin ketersediaan elpiji dari pemasok resmi ke Kalbar.●

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA.
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Mei, Tender 15 Blok Migas

Jakarta, Probisnis RM.

Pemerintah akan menenderkan setidaknya 15 blok minyak dan gas (migas) pada Mei 2008. Direktur Hulu Migas Departemen ESDM, R Priyono, mengatakan, tender tersebut bagian pertama dari target dua kali lelang blok migas tahun 2008. "Mungkin ada sebanyak 15 blok yang akan ditenderkan," ungkapnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, saat ini, pihaknya masih menyelesaikan proses tender 26 blok migas yang telah diumumkan sejak Januari lalu. "Rencananya, Maret ini akan diumumkan," cetusnya.

Ia mengatakan, dari 26 blok itu, Blok Semai V di Papua yang paling banyak diminati, karena diperkirakan memiliki cadangan minyak cukup besar sekitar satu miliar barel.

Priyono juga menambahkan, dalam kontrak blok migas baru, pemerintah memasukkan klausul baru menyangkut klaim biaya pengembalian produksi (cost recovery).

Dalam kontrak lama, kontraktor bisa mengklaim "cost recovery" lapangan yang masih tahap eksplorasi sebagai pengembangan lapangan yang sudah berproduksi. Sedang, dalam kontrak baru, kontraktor harus memproduksi dahulu, baru bisa mengklaim "cost recovery." ● MAF

35

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2008

DISTRIBUSI TERTUTUP BBM

Smart Card Bisa Picu Kekacauan di Masyarakat

Kamsari
 NERACA

Jakarta - Rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan premium dan solar bersubsidi dengan menggunakan kartu *Smart Card* dinilai bisa timbulkan kekacauan.

"Akan kacau apabila pemerintah tidak menyiapkannya secara matang," kata anggota Komisi VII DPR Alvin Lie di Jakarta, kemarin.

Menurut Alvin Lie, pemakaian *smart card* akan menimbulkan kekacauan di lapangan yang berakibat distribusi premium dan solar akan terganggu. "Ekonomi akan stagnan dan inflasi tinggi," tandasnya.

Alvin mencontohkan, uji coba pemerintah membatasi premium beberapa waktu lalu yang terbukti gagal total dan program konversi minyak ke elpiji juga morat-marit. "Sekarang mau main-main lebih besar lagi dengan pembatasan premium dan solar," katanya.

Dia menyesalkan, sikap pemerintah yang belum mengajak bicara DPR terlebih dahulu soal pembatasan yang terkait asumsi dasar APBN tersebut. "Pemerintah belum pernah membicarakannya dengan Ko-

misi VII DPR maupun komisi sampai detik ini," ujarnya.

Namun, Alvin menyarankan, agar kebijakan pembatasan premium dan solar dengan *smart card* dilakukan dengan sensus terlebih dahulu menyangkut siapa dan di mana penggunaannya. Selanjutnya, melakukan uji coba dalam lingkup kecil dan menghitung pula investasi komputerisasi *smart card* dengan penghematan yang didapat.

Senada dengan Alvin, Sekjen Komite Indonesia untuk Penghematan dan Pengawasan Energi (Kipper) Sofyano Zakaria menyatakan, konsep pembatasan dengan *smart card* belum teruji secara akurat sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan. "Jangan hanya melihat penghematan subsidi BBM saja, tapi harus dilihat ongkos sosial politik yang mungkin ditimbulkannya," katanya.

Sedang, Sofyano menyarankan, agar pemerintah melarang saja mobil mewah menggunakan BBM bersubsidi dengan dukungan berupa peraturan presiden (perpres). Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong kendaraan umum dan pribadi menggunakan bahan bakar gas

(BBG). "Kedua usulan itu saya kira dampak sosial politiknya tidak akan sebesar jika pemerintah tetap memaksakan pembatasan BBM dengan *smart card*," ujar Sofyano.

Sebelumnya, Dirut Pertamina Ari Soemarno juga mengkhawatirkan, jika tidak disiapkan dengan matang, maka akan terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya.

"Kalau terjadi antrian di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum), nanti Pertamina juga yang disalahkan," katanya.

Menurut dia, Pertamina akan menjadi tumpuan kekesalan masyarakat jika terjadi kekacauan program karena BUMN itulah yang menjual BBM ke konsumen. Namun, Ari mengatakan, jika disiapkan secara matang dan dilakukan bersama-sama pihak terkait, maka pembatasan premium dan solar bisa dilakukan dengan baik.

Dampak Pembatasan

Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan menegaskan, industri makanan skala usaha kecil dan menen-

gah (UKM) akan terkena dampak terparah, apabila pembatasan BBM bersubsidi jadi diberlakukan pada bulan Mei 2008. Alasannya, sektor UKM belum memiliki sistem distribusi yang efisien.

"Dampak pembatasan BBM pasti akan berdampak terhadap biaya transportasi industri makanan, terutama sektor UKM yang belum menerapkan sistem distribusi yang efisien," katanya.

Oleh sebab itu Thomas mengimbau, agar penerapan pembatasan BBM perlu dikaji ulang oleh pemerintah karena justru menurutnya yang paling terkena dampak adalah sektor UKM, termasuk makanan.

"Masak untuk membawa beberapa kardus saja memakai mobil besar. Kalau perusahaan-perusahaan besar, mereka sudah melakukan antisipasi dengan penerapan distribusi yang efisien dengan membuat pusat distribusi," imbuhnya.

Ia mencontohkan, untuk beberapa negara lain sudah menerapkan sistem distribusi yang terpusat sehingga arus distribusi bisa lebih hemat seperti di AS dan Australia. ●

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOG
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2008

KEJAR TARGET PRODUKSI

Chevron Butuh 225 Sumur Tambahan

NERACA

Pekanbaru - Chevron Pacific Indonesia membutuhkan tambahan 225 sumur produksi guna mencapai target produksi minyak 414 ribu barel per hari (bph) pada tahun 2008.

Semula sumur produksi yang dibutuhkan hanya 525 sumur dengan target produksi 403 Bph harus ditambah menjadi 750 sumur produksi untuk mengejar tambahan produksi yang telah ditetapkan BPMIGAS.

"Itu berarti rata-rata tambahannya dua sumur perhari untuk mengejar target yang diinginkan pemerintah," jelas Suwito Anggoro, Dirut Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Pekanbaru, pekan lalu.

Semula CPI mematok target produksi realistis 403 ribu bph pada tahun 2008. Namun guna menambah produksi nasional yang tahun lalu hanya mencapai 954

ribu bph atau 96 persen dari target produksi. Maka CPI diberi target untuk menambah produksi sebesar 11 ribu bph.

Untuk mencapai target tambahan produksi, biasanya industri migas memerlukan berbagai kemudahan. Misalnya kemudahan prosedur, keamanan dan kondisi alamnya. Selain butuh dukungan Pemda, Pemerintah dan BPMIGAS harus terpadu sehingga target produksi nasional tercapai.

Menurut Suwito, tahun 2007, CPI (Sumatera) produksi rata-rata 425.500 bph dari target semula 415.000 bph. Semula pengeboran sumur produksi ditargetkan 284 sumur, namun realisasinya meningkat mencapai 365 sumur sehingga terjadi penambahan produksi 14 ribu bph. Investasi belanja modal (*Capex*) tahun 2007 sebesar 800 juta Dolar AS untuk kegiatan *base business*, eksplorasi dan investasi proyek.

"Tahun 2008 Chevron

memiliki rencana investasi dan pengeboran lebih agresif," jelasnya. Namun Suwito menolak menyebutkan angka pasti besaran *capex* untuk tahun 2008.

Chevron juga, tambah Suwito dalam mengejar target yang ditetapkan BPMIGAS akan memaksimalkan produksi lapangan-lapangan yang sudah ada guna menahan laju alamiah penurunan produksi. Caranya, dengan meningkatkan aktivitas pengeboran, melakukan *workover* dan perawatan sumur secara agresif dan meningkatkan prediksi cadangan dan produksi.

"Bila kami tidak melakukan upaya apapun penurunan produksi bisa mencapai 16 persen pertahunnya, padahal selama 83 tahun produksi nasional separuhnya berasal dari lapangan minyak tersebut," jelasnya.

(Deden Sudrajat/Kamsari)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2008

Gas Naik Produsen Keramik Koreksi Harga

Sigit Suhardi
NERACA

Jakarta - Industri keramik di Indonesia sedang dihantui kenaikan harga BBM termasuk gas. Tak terkecuali produsen keramik PT Granitoguna Building Ceramic yang hingga kini belum dapat menyesuaikan harga.

Di pasaran saat ini produk Granito masih berkisar Rp150 sampai Rp300 ribu per meter persegi. Sampai saat ini Granito masih mempertahankan harga, namun belum tahu hingga kapan harga tersebut dapat dipertahankan.

"Mungkin kalau produ-

sen lain mulai merevisi harga, kami juga akan melakukan hal sama," kata Manager Proyek Produsen Keramik Granito Maria Magdani, disela penandatanganan kerjasama dengan apartemen The Lavande, Sabtu.

Maria mengatakan gas merupakan komponen terbesar dalam pembuatan keramik. Itu sebabnya produsen keramik sangat bergantung pada energi gas. "Ini yang menjadi kendala besar bagi produsen keramik. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi koreksi harga," katanya.

Granito yang produknya menggunakan lisensi dari

Australia diproduksi PT Granitoguna Building Ceramic masih satu grup dengan Djabesmen memiliki pabrik di kawasan Lemah Abang Bekasi Jawa Barat.

Granito masuk di pasar Indonesia pada tahun 1998 dengan merek di pasar Indonesia seperti Aurora, Salsa, Palazzo, serta Castello. Masing-masing punya pasar sendiri, paparnya.

Konsumen Granito sendiri menurut Maria berasal dari rumah maupun apartemen menengah atas mengingat harganya di atas harga keramik yang ada di pasar saat ini.●

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Pertamina Ogah Disalahkan Smart Card BBM Malah Mencemaskan

Rencana pembatasan penggunaan BBM lewat Smart Card mengundang kecemasan. Pertamina ogah disalahkan.

KALANGAN DPR menilai pembatasan BBM lewat smart card yang akan ditempuh pemerintah dalam rangka mengirit subsidi BBM akan menjadi kacau. Kekisruhan yang terjadi bisa seperti kartu bantuan langsung tunai (BLT) yang bisa diperjualbelikan.

BLT semula dikeluarkan untuk kompensasi warga miskin atas kenaikan harga BBM pada Oktober 2005. Setiap warga miskin mendapat BLT per tiga bulan Rp 300 ribu.

Untuk itu, DPR meminta pemerintah melakukan konsultasi dahulu kepada DPR sebelum melempar wacana-wacana, dan melakukan pematangan kebijakan ini. DPR mengingatkan keputusan yang serba terburu-buru tidak akan menelorkan kebijakan yang efektif.

Anggota Komisi VII DPR-RI Tjatur Sapto Edi mengungkapkan, rencananya Komisi VII akan me-

manggil Menteri ESDM beserta jajarannya pada tanggal 20 Februari ini, untuk membahas masalah di seputar BBM khususnya pembatasan BBM ini.

"Kalau mobil yang mendapat smart card hanya yang tergolong tidak mewah. Saya khawatir seperti BLT, kartunya bisa diperjualbelikan. Padahal masyarakat menengang BLT bukan sesuatu yang sukses tapi banyak kekisruhan," ujarnya.

Tjatur merasa program pembatasan BBM ini hanya akan menyuburkan penyelewengan karena banyak kelemahan. Mengingat selama ini pengawasan yang diterapkan pemerintah untuk BBM belum ada yang efektif. Sehingga masih banyak penyelundupan dan penyalahgunaan.

Sementara Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Ari H. Soemarno mengatakan bahwa jika tidak disiapkan matang, pihaknya khawatir akan terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya. "Kalau terjadi antrian di SPBU, nanti Pertamina juga yang disalahkan," katanya.

Menurut dia, Pertamina akan menjadi tumpuan kekesalan ma-

syarakat, jika terjadi kekacauan program, karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itulah yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) ke konsumen. Namun, Ari mengatakan, jika disiapkan secara matang dan dilakukan bersama-sama pihak terkait, maka pembatasan premium dan solar bisa dilakukan

secara baik.

Pemerintah berencana memulai program pembatasan premium dan solar bersubsidi dengan menggunakan "smart card" pada Mei 2008. Pada tahap awal, pembatasan dilakukan di Jabodetabek dan selanjutnya mencakup seluruh Jawa dan Bali hingga akhir 2008. ● DMS

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Keynes, asumsi makro dan gejolak eksternal

Oleh MUHAMMAD CHATIB BASRI
Ketua LPEM UI

“When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?
(ketika fakta berubah, saya mengubah pandangan saya. Bagaimana dengan tuan?).

Sebagian dari kita mungkin ingat kutipan itu. Itu adalah jawaban yang diberikan oleh ekonom terbesar abad ke-20 John Maynard Keynes, ketika ia dikritik karena mengubah pandangan kebijakan monev-ternya ketika depresi besar terjadi pada 1930-an. Dan benar, Keynes mengubah argumen-tasi dan pandangannya ketika

fakta berubah.

Dalam konteks ini, saya kira langkah yang dilakukan pemerintah mengubah asumsi makro dalam APBN 2008 adalah sebuah langkah yang realistis dan harus dilakukan.

Bayangkan jika pemerintah tak mau mengubah asumsi APBN hanya karena ingin mempertahankan konsistensi atau kredibilitas: yang terjadi adalah sebuah APBN yang jauh dari realistis dan tak kredibel.

Dengan situasi eksternal yang bergejolak ini saya kira memang ada beberapa hal yang harus disesuaikan untuk menjaga kestabilan makro dan membuat APBN 2008 tetap berkesinambungan.

Pertama, asumsi harga dan produksi minyak. Ke depan, ketidakpastian akibat harga minyak masih akan terjadi dan harga minyak diperkirakan cenderung berada pada tingkat yang tinggi.

Beberapa hal yang mendorong tingginya harga minyak dalam jangka pendek adalah permintaan global, khususnya dari *emerging market*, diperkirakan masih akan cukup kuat, sementara tingkat produksi non-OPEC masih relatif lemah dan depresiasi dolar yang membuat harga minyak dalam nominal US dolar menjadi meningkat.

Namun di sisi lain, kemungkinan harga minyak menurun juga terbuka mengingat melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia yang dipicu oleh melemahnya ekonomi AS.

Dengan kondisi ini, saya kira asumsi harga minyak \$60 per barrel jelas tak realistis. Melihat kecenderungan yang ada, tampaknya asumsi harga minyak mungkin akan berada pada kisaran US\$80-US\$90 per barrel.

Hal lain, yang juga penting adalah produksi minyak (*lifting* minyak) yang seperti ditulis *Bisnis Indonesia* (9 Februari 2008) diturunkan dari 1,034 juta barrel per hari menjadi 910.000 barrel per hari. Ini adalah sebuah keputusan yang baik. Melesetnya asumsi produksi minyak, membawa dampak yang amat besar kepada melebarnya defisit APBN.

Oleh karena itu, asumsi *lifting* yang konservatif jauh lebih baik.

Bagaimana dengan konsumsi? Dampak kenaikan harga minyak akan membuat disparitas harga domestik dengan internasional meningkat. Akibatnya, insentif untuk penyelundup meningkat. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin kon-

sumsi BBM akan meningkat -- karena aktivitas penyelundupan yang naik.

Di sini perkiraan konsumsi sebaiknya dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi 2007, konsisten seperti angka yang dikutip harian *Bisnis Indonesia*.

Kedua, pertumbuhan ekonomi. LPEM-FEUI awalnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2008 hanya akan mencapai 6,5%, di bawah target pemerintah 6,8%. Artinya keputusan pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi adalah keputusan yang realistis. Ancaman resesi ekonomi di AS diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi global.

Akibatnya, ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia, juga akan turun. Akan tetapi dugaan saya, pengaruh pertumbuhan ekonomi AS kepada ekspor Indonesia mungkin tidak sekuat dulu.

Semakin pentingnya ekonomi Asia Timur, termasuk masih relatif kuatnya pertumbuhan ekonomi China -- walau ekonomi AS melemah--menunjukkan dampak resesi di AS tidaklah sekuat beberapa tahun lalu.

Dampak resesi AS terhadap ekonomi Asia Timur, terutama China, mungkin baru akan terasa pada paruh kedua 2008 atau awal 2009, sehingga peluang ekspor untuk tetap tumbuh masih terbuka.

Ketiga, hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketidakpastian pasar keuangan akibat dampak kasus *subprime* di AS. Dengan pasar keuangan yang tak pasti, risiko gejolak di pasar saham dan obligasi dapat selalu terjadi.

Dalam konteks ini, variabel yang harus dijaga adalah nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang melemah dapat membawa akibat meningkatnya tekanan terhadap inflasi. Di sini BI harus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah.

Selain itu hal yang amat penting diperhatikan adalah tekanan inflasi akibat kenaikan harga komoditas, terutama pangan. Kenaikan harga pangan dan melemahnya nilai tukar dapat memengaruhi inflasi. Ekspektasi inflasi yang meningkat juga dapat membuat tekanan inflasi meningkat. Di sini saya melihat tak banyak ruang tersisa bagi Bank Indo-

nesia untuk menurunkan tingkat bunganya. Kebijakan moneter yang hati-hati harus diterapkan untuk meredam inflasi.

Keempat, defisit anggaran. Harga minyak dan pangan yang tinggi meningkatkan subsidi BBM dan pangan. Dengan kondisi seperti ini, tekanan terhadap defisit APBN 2008 akan meningkat. Implikasinya dibutuhkan pembiayaan yang lebih besar pula. Padahal kita tahu, dalam situasi pasar keuangan dunia yang bergejolak seperti ini, pembiayaan dari pasar tak mudah dan biayanya relatif lebih mahal.

Karena itu, saya kira keputusan mengalihkan subsidi BBM kepada subsidi pangan adalah keputusan yang tepat sekali, karena dampak dari kenaikan harga makanan tak bisa dianggap remeh. Kita tahu makanan memegang porsi yang besar dalam pengeluaran, terutama bagi mereka yang miskin. Permasalahannya adalah mekanisme pengalihan apa yang dipilih.

Saya melihat bahwa jika pemerintah mempertahankan subsidi minyak tanah, tetapi mengurangi sedikit subsidi premium dan mengalihkannya ke-

pada makanan, maka tekanan dalam defisit anggaran sedikit dapat dikurangi dan daya beli kelompok miskin dapat dijaga.

Pemerintah memang telah memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM ini dengan cara mengurangi konsumsi premium melalui pembatasan. Namun, kita harus hati-hati dengan skema pembatasan ini. Salah satu kelemahan pemerintah adalah masalah pengawasan dan administrasi.

Setiap kebijakan yang membutuhkan pengawasan dan administrasi dalam skala masif—seperti program pembatasan BBM ini—kerap kali sulit diimplementasikan. Karena itu, ketimbang memilih beban yang berada diluar kapasitas birokrasi dan berisiko gagal, mengapa tidak mengalihkan subsidi dengan cara dan pengelolaan administrasi serta pengawasan yang lebih mudah.

Caranya? Menaikkan sedikit harga premium. Jika khawatir dengan dampak inflasinya, tak perlu dilakukan terlalu besar, naikkan saja beberapa ratus rupiah. Kenaikan harga premium Rp300-Rp500 per liter, misalnya, akan membantu meng-

alihkan subsidi BBM kepada pangan sebesar Rp5 triliun-Rp10 triliun.

Jika tak ingin melakukannya secara sekaligus, dapat dilakukan berkala. Misalnya, premium dinaikkan Rp300 dalam satu tahun, maka sebetulnya kenaikan premium hanya Rp25 per bulan. Sesuatu yang tentu saja masih berada dalam jangkauan. *Toh*, pembatasan BBM premium, pada akhirnya juga akan mengubah konsumsi orang dari premium ke pertamax, yang artinya menaikkan harga juga secara tidak langsung.

Jika dampaknya sama, pertanyaannya adalah mengapa tidak memilih yang paling mudah dan realistis? Jika hal ini dilakukan, tekanan pada defisit anggaran akan relatif bisa dikendalikan dan daya beli penduduk miskin dapat dijaga dari kejutan eksternal.

Pilihan kebijakan yang tersedia memang tak mudah. Karena itu, mengubah asumsi dan juga mengubah kebijakan ekonomi sesuai dengan situasi memang harus dilakukan. Persis seperti ungkapan Keynes, "*When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?*"

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

Pertamina Tidak Risau, Pasokan Pertamax Aman

BPH Migas masih konsentrasi menerapkan pembatasan dengan *smart card*

Sandy Baskoro, Umar Idris

JAKARTA. Pembatasan konsumsi premium dan solar bagi kendaraan pribadi yang bergulir mulai Mei nanti akan berdampak pada distribusi bensin Pertamax dan Pertamax plus. Maklum dengan jatah lima liter perhari, pemilik mobil pribadi yang biasa mengkonsumsi premium harus beralih ke Pertamax.

Untuk itu Kepala Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Tubagus Haryono meminta Pertamina betul-betul menyiapkan distribusi bensin Pertamax. Maklum, saat ini tidak semua SPBU milik Pertamina menyediakan bensin mahal tersebut. Hal ini karena memang permintaan bensin pertamax masih sedikit, yakni sekitar 5%.

Tetapi Tubagus mengaku BPH Migas tidak terlampau khawatir dengan masalah distribusi Pertamax dan Pertamax plus. Alasannya, jika Pertamina kewalahan melayani permintaan Pertamax dan

Pertamax plus, konsumen bisa membeli produk sejenis di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Shell atau Petronas.

Itulah sebabnya BPH Migas saat ini masih fokus membahas mekanisme pembatasan premium dan solar melalui kartu kendali bernama *smart card* tanpa terjadi kebocoran. "Kami masih menunggu laporan Pertamina soal teknis suplai Pertamax dan Pertamax plus," ujar Tubagus, kemarin (10/2).

Pertamina jamin pasokan

Sementara itu, juru bicara Pertamina Wisnuntoro mengakui pasokan bensin Pertamax dan Pertamax plus masih kecil yakni sebesar 5%. Namun ini bukan berarti Pertamina tidak mampu memasoknya. Pasokan kecil ini karena permintaan masyarakat yang memang sangat kecil terhadap bensin jenis mahal tersebut.

Jika pembatasan premium dan solar berlaku, Wisnuntoro memastikan pasokan

bensin Pertamax dan Pertamax plus tidak akan terganggu. Pertamina sudah menyiapkan pasokan Pertamax plus dari kilang minyak Balongan Indramayu, Jawa Barat. Adapun untuk Pertamax berasal dari tujuh kilang minyak Pertamina di Jawa dan Sumatra seperti yang berlaku saat ini.

**Jika Pertamina
kewalahan melayani
Pertamax/plus,
konsumen bisa beli dari
Shell atau Petronas.**

Sama halnya dengan BPH Migas, saat ini Pertamina masih sibuk menyiapkan pelaksanaan pembatasan premium dan solar. "Kami masih membicarakan teknis pendistribusian *smart card*," tutur Wisnuntoro.

Sumber KONTAN di BPH Migas menyatakan distribusi Pertamina dan Pertamina Plus sebenarnya tidak kalah penting. Maklum, dengan kuota yang sedikit, pemilik mobil akan beralih ke Pertamina. Padahal saat ini pasokan sangat sedikit. Selain itu tidak semua SPBU Pertamina menjual bensin tersebut. "Jangan jauh-jauh, coba pergi ke Cirebon. Di sana masih banyak SPBU yang belum menjual Pertamina, apalagi Pertamina plus," kata si sumber. Alhasil, para pemilik mobil pribadi akan mengantri panjang untuk mendapatkan Pertamina.

Sekadar mengingatkan, rapat di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, 5 Februari lalu memutuskan pemerintah akan membatasi pemakaian bensin premium bagi pemilik mobil pribadi. Tak hanya itu, pemerintah pun membatasi konsumsi solar juga. Setiap pemilik mobil akan membeli premium atau solar dengan *smart card* dengan jatah 5 liter per hari. Rencananya, pemerintah akan memberlakukan kebijakan ini mulai Mei nanti.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2008

■ KEBUTUHAN GAS ELPIJI

Kalbar Minta Pasokan Gas dari Malaysia

SINGKAWANG. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat mengusulkan impor gas elpiji secara khusus dari Malaysia agar bisa memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Dengan impor gas dari Malaysia ini, mereka berharap tak lagi menggantungkan pasokan gas elpiji dari Jawa dan Sumatera yang selalu terhambat oleh berbagai masalah, termasuk transportasi.

Asisten II Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Kalimantan Barat Abdul Munir mengungkapkan usulan tersebut akan dia sampaikan dalam pertemuan reguler antara pemerintah Indonesia-Malaysia yang membahas masalah sosial ekonomi atau Sosek Malindo.

Asal Anda tahu saja, selama ini warga Kalimantan Barat menggantungkan pasokan gas hanya dari Pertamina. Namun, selama Desember 2007, akibat cuaca buruk di Laut China Selatan, pengangkutan gas elpiji dari Jawa dan Sumatera ke Kalimantan Barat terganggu. Ini mengakibatkan kelangkaan gas elpiji selama tiga pekan. Kalaupun barangnya ada, harganya sudah melenting sangat tinggi.

Kondisi ini makin parah dengan melonjaknya kebutuhan masyarakat menjadi 64 ton per hari sejak Januari 2008. Pertamina Unit Pemasaran VI mengakui terjadi kekurangan 24 ton elpiji di Kalimantan Barat karena peningkatan pembelian serta terbatasnya kapasitas Stasiun Pengisian dan Penyaluran Elpiji Khusus (SPPEK) milik PT Gemilang Asia Sejahtera di Desa Wajok, Pontianak selama periode Januari 2008.

Seretnya pasokan gas ini son-tak membuat harga gas elpiji melambung tinggi. Dari harga rata-rata Rp 75.000 per tabung ukuran 12 kilogram menjadi Rp 85.000 hingga Rp 120.000.

Pertamina pun sempat mengusulkan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk empat wilayah distribusi utama yakni Pontianak Rp 69.000, Singkawang Rp 71.000, Kabupaten Sanggau Rp 74.000 dan Kabupaten Ketapang Rp 85.000. Namun, usulan untuk menekan kebutuhan gas itu masih belum direstui.

**Pemerintah
 Malaysia mulai
 membatasi
 pembelian gas
 elpiji oleh warga
 Indonesia.**

Maka tak heran, apabila warga Kalimantan Barat berpaling ke elpiji asal Malaysia sebab harganya lebih murah dan kapasitasnya lebih besar ketimbang produk Pertamina. Harga elpiji Malaysia berkisar RM 26 atau setara dengan Rp 75.400 per tabung. Sementara isinya lebih berat 16 kilogram bila dibandingkan dengan elpiji Pertamina. Namun, Pemerintah Malaysia mulai membatasi pembelian gas elpiji oleh warga Indonesia. "Sekarang setiap orang hanya boleh membawa satu tabung. Kalau dulu, bisa dua," kata Wisnu, warga Singkawang.

Edy Can, Antara

42

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGST			SEPT			OKT			NOV			DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

7 Perusahaan Ikutan Tender Migas, Pertamina Dan Exxon Favorite

SEKTOR migas terbukti memang magnet yang punya daya tarik kuat. Tak urung 33 perusahaan berminat mengikuti tender wilayah kerja (WK) migas yang dibuka pemerintah pada akhir Desember lalu.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas Departemen ESDM, R Priyono mengatakan, hingga pekan ini, sudah ada 33 perusahaan yang mengambil dokumen penawaran untuk mengikuti tender. "Jumlah tersebut bisa terus bertambah," ujarnya di Jakarta.

Menurutnya, 33 perusahaan tersebut sudah mengambil 73 buku dokumen penawaran wilayah migas. Artinya, lanjut dia, perusahaan-perusahaan migas tersebut rata-rata mengambil lebih dari dua dokumen. "Biasanya, beberapa perusahaan memang ikut tender beberapa WK sekaligus," katanya.

Dia merinci, dari jumlah tersebut, 50 dokumen penawaran diantaranya untuk 18 blok yang ditawarkan melalui tender reguler. Sedangkan 23 dokumen penawaran lainnya, untuk 5 blok yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran langsung.

Priyono mengatakan, profil 33 perusahaan tersebut juga beragam. Dia menyebut, ada 7 perusahaan besar, 10 perusahaan menengah, 1 perusahaan nasional, serta 15 perusahaan atau peserta baru.

Perusahaan besar yang bakal mengikuti tender, kata Priyono, adalah BP Exploration Indonesia, Chevron Indonesia Ventures, ConocoPhillips Indonesia, Eni Indonesia, HESS, Marathon Int'l Petroleum Indonesia dan Total E&P Indonesia.

Sedangkan perusahaan kategori menengah yang ikut ambil bagian dalam proses tender adalah CNOOC SES, Genting Oil & Gas, Japan Petroleum Exp, Lundin Oil & Gas B.V, Murphy Overseas Ventures, Petronas Carigali, PT Medco E&P Indonesia, Stat Oil, Hydro Karama dan Husky

Energy Internasional. "Satu perusahaan nasional yang ikut adalah PT Eksindo Petroleum Tabuhan," sebutnya.

Sementara itu, lanjut dia, 15 perusahaan atau peserta yang baru kali ini ikut serta, terdiri dari 11 perusahaan asing dan 4 perusahaan nasional. Perusahaan asing tersebut adalah Carnavon Petroleum, China Gas, Enovation Resources, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOG-MEC), LNG Japan Corporation, Lukoil Overseas Holding, Natuna Ventures, Newfield Peninsula Malaysia, Nippon Oil Exploration dan Tansar Gas Pte serta Mitsui & Co.

Sedangkan 4 perusahaan nasional baru adalah Archipelago Resources, Asia Pasific Exp, PT Gema Terra dan PT Perusda Pertambangan Barakaltim Sejahtera.

Priyono menambahkan, dua perusahaan besar yang belum mengambil dokumen penawaran adalah PT Pertamina dan Exxon-Mobil. Meski demikian, lanjut dia, kedua perusahaan tersebut sudah menyatakan minatnya. "Beberapa perusahaan, biasanya memang melakukan pengecekan dulu," katanya.

Sebelumnya, Dirjen Migas Departemen ESDM, Luluk Sumiarso mengatakan, salah satu blok yang banyak diminati adalah Blok Semai V di Papua yang diperkirakan memiliki cadangan hingga 1 miliar barel. "Beberapa perusahaan besar memang mengincar blok tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Hulu PT Pertamina Sukusen Soemarinda mengatakan, pihaknya tengah melakukan kajian terhadap 26 blok yang ditawarkan. "Jika prospektif, kami pasti akan masuk," tuturnya.

Terkait blok mana saja yang bakal diincar Pertamina, Sukusen mengaku belum bisa menyebut secara rinci. Meski demikian, dia mengatakan bahwa tahun ini Pertamina akan fokus pada beberapa blok di wilayah timur Indonesia, terutama di kawasan laut dalam. ● MAF

43

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOG
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2008

Migas-Sumber Energi Alternatif

MINYAK dan gas bumi pernah menjadi juru selamat bangsa ini. Minyak dan gas bumi pernah pula menjadi sumber kesengsaraan bangsa ini. Minyak, melalui Pertamina yang dikomandani Ibnu Sutowo, sukses menyelamatkan Indonesia dari jurang kebangkrutan yang menjadi warisan Orde Lama dengan inflasi mencapai 600%.

Pada masa itu, produksi minyak Indonesia hanya 500.000 barel/hari. Penggenjotan produksi membuat Indonesia mampu memproduksi minyak hingga sekitar 1,7 juta barel per hari. Indonesia mengalami surplus produksi minyak karena konsumsi saat itu jauh dari angka 1 juta barel per hari. Hasilnya adalah pemasukan ekstrasbesar yang mampu

menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Dalam perkembangannya, minyak dan gas bumi masih tetap menjadi titik sentral bangsa ini. Pada APBN 2007 saja, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ini mencapai Rp145,8 triliun, atau mencapai 71% dari total PNBP Indonesia. Uang se-besar itu hanya bisa disaingi oleh penerimaan dividen dari BUMN yang mencapai Rp16,1 triliun, atau hanya sebesar 8% PNBP. Bahkan, pajak penghasilan dari sektor minyak dan gas bumi saja mencapai Rp39 triliun.

Namun, kini minyak bumi menjadi sumber kesengsaraan bangsa ini. Menurunnya produktivitas sumur-sumur yang sudah uzur yang ditingkahi dengan naiknya kon-

sumsi dalam negeri, dan harga pasar dunia yang tidak terkontrol membuat bangsa ini menghadapi hadangan defisit yang besar. Negara eksportir ini ternyata harus menjadi importir.

Pengalaman sudah seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah. Sudah saatnya untuk mencari dan memberdayakan alternatif energi lain. Indonesia memiliki potensi berbagai sumber energi alternatif yang masih belum diberdayakan secara maksimal (*lihat grafis*). Pemerintah harus menganggarkan biaya penelitian yang lebih besar dan ditopang dengan berbagai insentif agar sektor energi alternatif ini dapat berkembang.

(pangeran ahmad nurdin/
litbang SINDO)

44

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8.4

TAHUN 2008

**Dua Anak Usaha
 Pertamina Segera
 Go Public**

JAKARTA — Dua anak usaha PT Pertamina (Persero) akan mengikuti jejak PT Elnusa Tbk. dengan menawarkan sahamnya ke publik melalui mekanisme *initial public offering* (IPO). IPO akan dilaksanakan pada semester pertama tahun ini. Kedua perusahaan itu adalah Tugu Pratama, yang bergerak di bidang asuransi, dan Patra Niaga.

Direktur Keuangan Pertamina Frederick S.T. Siahaan mengatakan rencana itu masih menunggu kepastian dari para pemegang saham lainnya, salah satunya perusahaan pengelola aset. Mekanismenya akan diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno mengatakan pihaknya sudah membentuk tim restrukturisasi dan reformasi perusahaan, yang bertugas menentukan anak usaha yang layak dilepas ke publik. Kriteria anak usaha Pertamina yang akan IPO adalah yang memiliki laba tiga tahun berturut-turut. Dari kriteria itu, kata dia, ada 12 anak usaha yang memenuhi syarat, di antaranya Tugu Pratama dan Patra Niaga.

● ARI ASTRI YUNITA

44 a .